



**ETIKA DISKURSUS JÜRGEN HABERMAS DAN KONFLIK
NORMATIF DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero
untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat
Program Studi Ilmu Teologi - Filsafat
Agama Katolik**

Oleh

ELRIKUS RIVALDI WANGKUT
NPM: 17.75.6090

**SEKOLAH TINGGI FILSAFAT KATOLIK LEDALERO
2021**

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero
dan Diterima untuk Memenuhi Sebagian
dari Syarat-syarat guna Memperoleh
Gelar Sarjana Filsafat
Program Studi Ilmu Teologi - Filsafat Agama
Katolik

Pada
1 Juni 2021

Mengesahkan
SEKOLAH TINGGI FILSAFAT KATOLIK LEDALERO




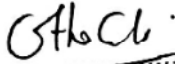

DEWAN PENGUJI

1. Dr. Mathias Daven : *mathias*
2. Dr. Otto Gusti Ndegong Madung : *OGM*
3. Dr. Yosef Keladu : *yosef*

LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL

1. Nama : Elrikus Rivaldi Wangkut
2. NPM : 17.75.6090
3. Judul : Etika Diskursu Jürgen Habermas Dan Konflik Normatif Di Indonesia

4. Pembimbing:

1. Dr. Mathias Daven (Penanggung jawab) : 
2. Dr. Otto Gusti Ndegong Madung : 
3. Dr. Yosef Keladu : 

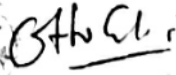

5. Tanggal diterima : 12 September 2020

6. Mengesahkan :

7. Mengetahui

Wakil Ketua I


Dr. Yosef Keladu

Ketua STFK Ledalero

Dr. Otto Gusti Ndegong Madung


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Elrikus Rivaldi Wangkut

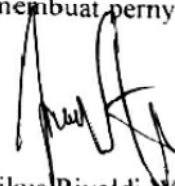
NPM: 17.75.6090

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **ETIKA DISKURSUS JÜRGEN HABERMAS DAN KONFLIK NORMATIF DI INDONESIA**, yang merupakan satu tuntutan akademis di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero adalah benar-benar hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari diketahui adanya pelanggaran akademis berupa plagiasi atau penjiplakan dan sejenisnya di dalam skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yaitu pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk diketahui.

STFK Ledalero, 14 Mei 2021

Yang membuat pernyataan



Erikus Rivaldi Wangkut

KATA PENGANTAR

Indonesia merupakan sebuah negara merdeka yang berdaulat. Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) mempunyai sejarah yang panjang dan menarik. Negara Indonesia merdeka dari penjajahan bangsa asing pada tahun 1945 melalui perjuangan para pahlawan. Bertolak dari semangat perjuangan para pahlawan dari latar belakang suku, ras, budaya dan agama yang berbeda, maka republik ini mengambil bentuk negara kesatuan dan pemerintahannya menganut sistem presidensial. Akan tetapi, realitas negara Indonesia yang plural ternyata menjadi sumber perdebatan di antara para *founding fathers* dalam merumuskan dasar negara. Dalam proses merumuskan dasar negara, muncul dua kelompok yang saling bertentangan yakni, kelompok yang memperjuangkan negara agama dan kelompok yang memperjuangkan negara sekular. Dari perdebatan yang begitu panjang, akhirnya para *founding fathers* tiba pada sebuah kesimpulan bahwa Indonesia merdeka tidak dibangun atas dasar ideologi agama tertentu, melainkan atas dasar nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh semua orang dan nilai-nilai itu dirumuskan dalam lima sila Pancasila. Pancasila merupakan konsensus atau kesepakatan luhur dari para *founding fathers*.

Pancasila dengan semboyan *Bhineka Tunggal Ika* lahir sebagai dasar untuk mempersatukan seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang yang berbeda. Akan tetapi, konsensus para *founding fathers* yang menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, masih menyisakan polemik di dalamnya. Munculnya kelompok Islam radikal adalah bentuk perlawanan terhadap konsensus para *founding fathers* yang mendirikan Indonesia dengan berlandaskan pada Pancasila. Kenyataan ini masih tidak diterima oleh kelompok yang memperjuangkan negara agama. Hal ini mengakibatkan lahirnya berbagai macam gerakan-gerakan radikal yang memperjuangkan negara agama. Formalisasi agama yang diperjuangkan oleh kelompok radikal untuk menjadikan Islam sebagai ideologi bangsa merupakan tindakan diskriminatif dan pelecehan terhadap Pancasila. Perjuangan memutlakkan kebenaran agama dan memaksakannya sebagai dasar negara adalah awal terjadinya konflik pada tataran norma di Indonesia. Oleh

karena itu, upaya menjadikan syariat Islam sebagai dasar penyelenggaraan hidup berbangsa tidak dapat diterima, karena berdampak pada tatanan sosial yang tidak stabil yang memecah belah persatuan.

Bertolak dari persoalan di atas, penulis menawarkan gagasan etika diskursus Jürgen Habermas sebagai prosedur bagi pengelolaan konflik normatif di Indonesia. Menurut Habermas keberlakuan suatu norma secara universal ditentukan dalam sebuah diskursus yang melibatkan semua pihak yang terkait.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini terdapat banyak kontribusi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga tulisan ini dapat diselesaikan dengan baik. Pertama-tama penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah memberikan rahmat-Nya kepada penulis untuk menyelesaikan tulisan ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) Ledalero, yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan iman. Terima kasih kepada Dr. Mathias Daven yang telah bersedia menjadi dosen pembimbing dan dengan sabar dan rendah hati mengarahkan penulis, mengoreksi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. Terima kasih kepada Dr. Otto Gusti Ndegong Madung yang bersedia menjadi dosen penguji dan memberikan kritikan, usul-saran kepada penulis demi penyempurnaan tulisan ilmiah ini. Terima kasih kepada Dr. Yosef Keladu yang bersedia menjadi dosen penguji ketiga.

Terima kasih pula kepada Biara St. Karolus Scalabrinian Maumere yang telah memberikan kemudahan bagi penulis dalam penyelesaian tulisan ilmiah ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan, usul-saran dan masukan dari para pembaca guna membangun dan memperdalam demi penyempurnaan tulisan ini.

STFK Ledalero, 14 Mei 2021

Penulis

ABSTRAK

Elrikus Rivaldi Wangkut. 17.75.6090. *Etika Diskursus Jürgen Habermas dan Konflik Normatif di Indonesia*. Skripsi. Program Sarjana, Program Studi Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero. 2021.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menelisik dan menjelaskan kontribusi etika diskursus Jürgen Habermas bagi pengelolaan konflik normatif di Indonesia, (2) menjelaskan konsep Jürgen Hebermas tentang etika diskursus, dan (3) mendeskripsikan realitas konflik normatif di Indonesia.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Obyek yang diteliti adalah etika diskursus Jürgen Habermas dan konflik normatif di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa bagi Jürgen Hebermas etika diskursus bertujuan pada pemahaman secara komunikatif dan saling pengertian dalam sebuah diskursus. Bentuk etika diskursus mengharuskan adanya kebebasan tanpa didikte oleh pihak manapun dan tidak saling mendominasi dalam sebuah diskursus. Hak seseorang tidak boleh dibatasi dalam menjalankan aktivitas rasio sebagai bagian dari kehidupan bersama tanpa memandang *background* seseorang. Etika diskursus merupakan prosedur yang ditawarkan Habermas dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dalam kehidupan bersama. Berhadapan negara Indonesia yang plural, relevansi etika diskursus Habermas perlu dipertanyakan keabsahannya. Sebab, masyarakat Indonesia secara radikal terikat dengan tradisi metafisiknya. Sedangkan etika diskursus adalah etika yang hanya mungkin berlaku pada masyarakat liberal yang bersifat post metafisik. Sebab, dalam konteks masyarakat Indonesia norma-norma moral tidak ditentukan lewat sebuah diskursus melainkan diturunkan melalui adat-istiadat atau ajaran agama-agama masing-masing. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa etika diskursus Habermas tidak relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang kental dengan budaya metafisiknya. Etika diskursus Habermas justru masih relevan dalam konteks masyarakat Indonesia karena menekankan beberapa hal penting yang menunjukkan identitas bangsa Indonesia seperti, toleransi, solidaritas, keterbukaan dan penghargaan terhadap otonomi yang lain.

Kata kunci: Habermas, etika diskursus, konflik normatif di Indonesia.

ABSTRACT

Elrikus Rivaldi Wangkut. 17.75.6090. **Jürgen Habermas Discourse Ethics and Normative Conflict in Indonesia**. Thesis. Undergraduate Program, Philosophy Study Program, Ledalero Catholic School of Philosophy. 2021.

This study aims to (1) examine and explain the contribution of Jürgen Habermas discourse ethics for normative conflict management in Indonesia, (2) explain Jürgen Hebermas's concept of discourse ethics, and (3) describe the reality of normative conflict in Indonesia.

The method used in this study is descriptive qualitative. The object of study is the ethics of discourse by Jürgen Habermas and normative conflict in Indonesia. Based on the results of the study, it was concluded that for Jürgen Hebermas discourse ethics aims at communicative understanding and mutual understanding in a discourse. The form of discourse ethics requires freedom without being dictated by any party and not dominating each other in a discourse. A person's rights should not be limited in carrying out rational activities as part of a shared life regardless of one's background. Discourse ethics is a procedure offered by Habermas in resolving conflicts that occur in common life. Facing this pluralistic Indonesian state, the ethical relevance of Habermas's discourse needs to be questioned for its validity. This is because the Indonesian people are radically bound by their metaphysical traditions. Meanwhile, discourse ethics is an ethic that may only apply to a liberal society which is post metaphysical. In the context of Indonesian society, moral norms are not determined through a discourse but are passed down through the customs or teachings of their respective religions. However, this does not mean that the ethics of Habermas's discourse is irrelevant in the context of Indonesian society which is thick with its metaphysical culture. Habermas's discourse ethic is still relevant in the context of Indonesian society because it emphasizes several important things that show the identity of the Indonesian nation, such as tolerance, solidarity, openness and respect for other autonomy.

Keywords: Habermas, discourse ethics, normative conflict normative in Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENERIMAAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG PENULISAN.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	8
1.3 TUJUAN PENULISAN	9
1.3.1 Tujuan Khusus	9
1.3.2 Tujuan Umum	9
1.4 METODE PENULISAN.....	9
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	10
BAB II JÜRGEN HABERMAS DAN ETIKA DISKURSUS	11
2.1 Pengantar	11
2.2 Sekilas tentang Jürgen Habermas	11
2.2.1 Biografi Jürgen Habermas.....	11
2.2.2 Beberapa Karya-Karya Intelektual Jürgen Habermas.....	14
2.2.2.1 Struktur Ruang Publik Borjuis.....	14
2.2.2.2 <i>Knowledge and Human Interest</i> (Pengetahuan dan Kepentingan Manusia)..	14
2.2.2.3 <i>Legitimationsprobleme Im Spätkapitalismus</i> (masalah legitimasi dan kapitalisme kemudian hari).....	15
2.3 Mazhab Frankfurt Konsep Dasar dan konsep dasar Jürgen Habermas Tentang Rasionalitas Komunikatif.....	15
2.3.1 Latar Belakang Sejarah Perkembangan Gagasan Rasionalitas Komunikatif.15	
2.3.1.1 Pemahaman konsep “Kritis” Kant, Hegel Dan Marx.....	15
2.3.1.2 Mazhab Frankfurt.....	17
2.3.1.3 Generasi Pertama Teori Kritis Mazhab Frankfurt Horkheimer, Adorno dan Marcuse.....	19
2.3.1.4 Jürgen Habermas Sebagai Pembaharu Mazhab Frankfurt	22
2.3.1.5 Gagasan Rasionalitas Komunikatif.....	26
2.4 Gagasan Etika Diskursus	30
2.4.1 Teori Tindakan Komunikatif: Basis Epistemik Etika Diskursus	35
2.4.1.1 Tindakan Komunikatif	35
2.4.1.1.1 Rasionalitas Komunikatif dan Rasionalitas Instrumental	35
2.4.1.2 Klaim Kesahihan.....	37
BAB III REALITAS KONFLIK NORMATIF DI INDONESIA	39
1.1 Pengantar.....	39

1.2 Pengertian Konflik	39
1.2.1 Arti Etimologis.....	39
1.2.2 Pengertian Menurut Kamus.....	40
1.2.3 Pengertian Menurut Ensiklopedi Ilmu Pengetahuan.....	40
1.2.4 Arti Realis	40
1.3 Pancasila Dan Konflik Normatif Di Indonesia.....	41
1.3.1 Perdebatan Para <i>Founding Fathers</i> Seputar Dasar Negara.....	42
1.3.2 Realitas Konflik Normatif di Indonesia	44
1.4 Faktor Penyebab Konflik Normatif	48
1.4.1 Eksklusivisme Agama	48
1.4.2 Fanatisme Agama	50
1.4.3 Klaim Kebenaran.....	51
1.4.4 Tirani Agama Mayoritas	54
1.5 Pengelolaan Konflik Normatif Dalam Bingkai Idea Keadilan Di Indonesia.....	54
1.6 Pancasila Sebagai Solusi Konflik Normatif di Indonesia	57
BAB IV RELEVANSI GAGASAN ETIKA DISKURSUS JÜRGEN HABERMAS BAGI PENGELOLAAN KONFLIK NORMATIF DI INDONESIA.....	64
4.1 Pengantar	64
4.2 Prinsip Dasar Etika Diskursus.....	64
4.3 Prinsip Yang Terkandung Dalam Etika Diskursus	66
4.3.1 Prinsip Penguniversersalisasi	66
4.3.2 Prioritas “Yang Moral” Atas “Yang Etis”	66
4.3.3 Pembuktian Terhadap Etika Diskursus	67
4.4 Konsensus Dalam Etika Diskursus.....	68
4.5 Etika Diskursus Dalam Konteks Indonesia.....	69
4.6 Relevansi Etika Diskursus Sebagai Basis Hidup Bersama Dalam Konteks Masyarakat Indonesia	70
4.6.1 Etika Diskursus: Membangun Masyarakat Ideal	71
4.6.1.1 Pengakuan Terhadap Agama yang Lain	71
4.6.1.2 Pentingnya Solidaritas dan Toleransi Terhadap Agama Lain.....	72
4.6.1.2.1 Solidaritas.....	72
4.6.1.2.2 Toleransi.....	72
4.7 Kontribusi Etika Diskursus Dalam Meminimalisir Konflik Normatif Di Indonesia	73
4.7.1 Relevansi Etika Diskursus Jürgen Habermas Dalam Pengelolaan Konflik Normatif di Indonesia	74
4.7.2 Keterbatasan Relevansi Etika Diskursus Berhadapan Dengan Konflik Normatif di Indonesia	77
4.8 Catatan Penutup	80
BAB V PENUTUP.....	82
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	83

DAFTAR PUSTAKA.....	87
----------------------------	-----------